

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mekanisme penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi suatu negara, begitu juga dengan investasi yang merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Sebagai upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investasi asing. Penerimaan investasi dalam negeri maupun investasi asing merupakan salah satu pos penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam hal pembiayaan anggaran dan belanja negara. Laju pertumbuhan perekonomian yang didasarkan pada alur investasi positif menggambarkan gerak pacu positif dengan dukungan beberapa faktor penunjang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya dengan keberlanjutan pembangunan diketahui dari peningkatan output sektor-sektor ekonomi riil yang dibentuk melalui mekanisme penambahan kapasitas produksi nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian yang berasal dari dalam negeri. Harrod Domar menyatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi baru sebagai stok modal seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan semakin banyaknya tabungan yang diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi secara riil tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut (Todaro, 2006:173).

PMDN dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi khususnya PMDN memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dalam hal ini investasi diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperoleh keuntungan di masa depan dengan cara memberikan aset yang dimiliki saat ini untuk tujuan usaha, dimana aset yang diberikan tersebut akan kembali dengan nilai yang lebih besar (Widiatmodjo dkk, 2007:2)

Investasi dunia usaha di daerah lebih banyak didominasi oleh pengusaha kuat padahal umumnya pengusaha lemah merupakan pengusaha lokal. Pembangunan yang dilaksanakan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan, untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah investasi mempunyai cakupan yang penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan nasional, melalui pos penerimaan negara sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang banyak terpinggirkan. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu : regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas pengusaha lokal, jaringan yang kuat dari pengusaha nasional, dan sebagainya. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah. Pemberdayaan investasi daerah merupakan upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

Mengingat pentingnya investasi, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai suatu peraturan yang khusus mengatur segala hal terkait investasi, meliputi lingkup investasi, tata cara, ketenagakerjaan, perlakuan terhadap investor yang terlibat dalam investasi, bidang usaha apa saja yang dapat dijadikan objek dalam investasi, segmentasi usaha berdasarkan ukuran usaha, hak dan kewajiban investor, sampai dengan sanksi dan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam proses investasi. Undang-Undang tersebut merupakan landasan yang mendasari segala bentuk investasi di Indonesia, sehingga bisa tercipta suatu iklim investasi yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian di berbagai wilayah Indonesia.

Iklim investasi yang kondusif mendorong peningkatan jumlah investasi di daerah, dimana hal tersebut dapat dilihat pada tabel tentang investasi PMDN di Jawa Timur di bawah ini:

Tabel 1.1 :
Investasi PMDN di Jawa Timur Tahun 2003 – 2013

Tahun	PMDN		
	Jumlah Proyek (unit)	Nilai Investasi (Milyard Rp.)	Perubahan (%)
2003	14	1.436,31	-
2004	19	2.741,33	90,86
2005	23	3.245,88	18,41
2006	17	2.781,45	-14,31
2007	17	4.291,32	54,28
2008	40	9.591,47	123,51
2009	48	4.290,70	-55,27
2010	89	8.084,10	88,41
2011	157	9.687,50	19,83
2012	289	21.520,30	122,15
2013	437	38.378,90	78,34

Sumber : BPM Jatim

Berdasarkan Tabel. 1.1. Nilai Investasi PMDN di Jawa Timur tahun 2003-2013 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, demikian pula jumlah proyek yang dikerjakan. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2004 dan 2005, nilai investasi dan realisasi proyek PMDN mengalami penurunan pada tahun 2006 yang sebesar Rp. 2,78 Trilyun Rupiah pada 17 unit proyek PMDN. Periode tahun 2006 – 2013 jumlah realisasi proyek PMDN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan Nilai investasinya secara umum mengalami peningkatan kecuali tahun 2009, sempat mengalami penurunan sebesar 55,27% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2012 dan 2013, nilai investasi PMDN di Jawa Timur meningkat cukup besar dengan prosentase kenaikan sebesar 122,15% dan 78,34%.

Kegiatan investasi dari dalam negeri dipengaruhi oleh suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (*present value*) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Suku bunga kredit yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Disamping itu suku bunga kredit yang tinggi juga akan menyebabkan *return* yang diisyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat.

Rendahnya suku bunga kredit, akan meningkatkan investor karena kredit yang diberikan bank masih menguntungkan untuk melakukan investasi. Ketika suku bunga kredit rendah, investasi akan meningkat (Lubis,2008:3).

Besarnya rata-rata suku bunga dasar kredit korporasi yang diterbitkan oleh Bank-bank di Indonesia periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2 :

**Nilai rata-rata suku bunga dasar kredit korporasi
Tahun 2008 – 2013**

Tahun	Suku bunga dasar kredit Korporasi (%)	Perubahan (%)
2003	15,45	-
2004	11,13	-27,99
2005	15,48	39,10

2006	15,18	-1,94
2007	13,45	-11,37
2008	14,40	7,06
2009	12,88	-10,59
2010	12,63	-1,94
2011	12,18	-3,56
2012	11,45	-5,95
2013	11,36	-0,83

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia secara periodik mengeluarkan suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga mengeluarkan suku bunga dasar kredit yang menjadi acuan bagi Bank Pemerintah maupun swasta dalam menerbitkan suku bunga dasar kredit. Berdasarkan Tabel 1.2. pada halaman 5, rata-rata nilai suku bunga dasar kredit korporasi bank-bank di Indonesia mengalami fluktuasi pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, dengan kenaikan persentase terjadi pada tahun 2005 dan 2008 sebesar 39,10% dan 7,06%. Pada periode tahun 2009 – 2013, rata-rata nilai suku bunga dasar kredit korporasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar -10,59%.

Investasi merupakan fungsi dari pendapatan nasional, semakin besar tingkat pendapatan nasional semakin besar pula pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, seperti tercermin dalam PDB (untuk tingkat nasional) dan PDRB (tingkat regional) maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal domestik bruto (Arsyad,1999:85). Secara umum Nilai PDRB Jawa Timur atas harga konstan 2000 pada periode tahun 2003 – 2013 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan Tabel 1.3. pada halaman 7. Terlihat bahwa PDRB jawa Timur selalu menunjukkan tren yang positif, meskipun persentase peningkatan PDRB tidak selalu sama, dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 7,27% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 393.662,85 Milyard, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 5,01% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 320.861,17 Milyard.

Tabel 1.3 :
Nilai PDRB di Jawa Timur
Tahun 2003 – 2013

Tahun	PDRB atas harga konstan 2000 (Milyard Rupiah)	Perubahan (%)
2003	229.341,93	-
2004	242.721,07	5,83
2005	256.905,22	5,84
2006	271.797,92	5,80
2007	288.404,31	6,11
2008	305.538,69	5,94
2009	320.861,17	5,01
2010	342.280,76	6,68
2011	366.983,28	7,22
2012	393.662,85	7,27
2013	419.428,45	6,55

Sumber : BPS Jatim

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana didalamnya terjadi peningkatan harga barang dan jasa sebagai akibat menurunnya nilai moneter dalam kurun waktu tertentu (Madura, 2007:128). Tingkat terjadinya inflasi dapat dilihat dari peningkatan indeks harga konsumen, yang merupakan indikasi dari sebagian besar harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Pemahaman mengenai inflasi yang senada di nyatakan oleh Ahman (2007:153), bahwa inflasi merupakan gambaran dari keadaan ekonomi dimana harga barang dan jasa mengalami peningkatan dari harga rata-rata pada umumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga barang dan jasa mengalami peningkatan dari harga rata-rata, yang berhubungan dengan penurunan nilai moneter dalam periode waktu tertentu.

Inflasi juga dapat mempengaruhi kegiatan investasi, hal ini dapat dilihat dari pengaruh inflasi terhadap kenaikan produksi. Alasannya, dalam keadaan inflasi terjadi kenaikan harga barang, sehingga keuntungan perusahaan naik. Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi dapat berakibat sebaliknya, yaitu penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai

uang riil turun dengan drastis, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi dalam keadaan yang pernah terjadi biasanya nilai inflasi lebih besar akan menaikkan output dan itu akan membuat pengusaha atau perusahaan untuk berinvestasi atau menanamkan modal mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan investor tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan harga tersebut.

Data Inflasi Jawa Timur periode tahun 2003 – 2013 ditunjukkan pada tabel 1.4. berikut :

Tabel 1.4 :

Nilai Inflasi Jawa Timur Tahun 2006 – 2013

Tahun	Inflasi (%)	Perubahan (%)
2003	7,32	-
2004	5,92	(19,07)
2005	9,77	64,95
2006	12,49	27,91
2007	6,02	(51,80)
2008	9,83	63,29
2009	4,88	(50,41)
2010	5,23	7,18
2011	5,64	7,94
2012	4,45	(21,10)
2013	6,88	54,61

Sumber : BPS Jatim

Perdagangan internasional merupakan pendorong positif dan kuat terhadap pembangunan ekonomi. Alasannya, untuk meningkatkan pembangunan perlu fokus pada kegiatan ekspor terutama produk sektor industri (*export promotion*). Peningkatan ekspor membuka peluang perolehan devisa yang diperlukan untuk mengimpor barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang-barang kapital (strategi kebijakan *substitution import*). Perdagangan yang dilakukan dapat menimbulkan *transfer knowledge* yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan input, sehingga akan mempercepat pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional juga memperluas pasaran dan merangsang investasi,

pendapatan dan tabungan melalui alokasi sumber daya dengan lebih efisien yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Jhingan, 2010: 448).

Peranan ekspor dalam kegiatan ekonomi sangat penting, karena ekspor merupakan komponen utama dalam mempercepat proses pembangunan daerah. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah maka upaya peningkatan kegiatan ekspor untuk produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi sangatlah penting untuk meningkatkan output total daerah. Dengan adanya peningkatan nilai ekspor diharapkan dapat menjadi motor penggerak proses pemulihan ekonomi dan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Tabel 1.5. pada halaman 10, selama kurun waktu tahun 2003 -2013 total ekspor Jawa Timur lebih banyak disumbang oleh ekspor Non-Migas dengan nilai total sebesar US \$ 121.891.787 ribu, sedangkan total nilai ekspor Migas hanya sebesar US \$ 7.211.236 ribu.

Tabel 1.5.

**Nilai Kurs Rupiah terhadap US\$ dan Ekspor Impor Jawa Timur
Tahun 2006 – 2012**

Tahun	Non migas		Migas		Nilai Kurs (Rupiah)
	Ekspor (000 US\$)	Impor (000 US\$)	Ekspor (000 US\$)	Impor (000 US\$)	
2003	5.484.317	3.787.649	184.458	1.327.570	8.450
2004	6.194.476	4.846.712	168.722	2.060.727	8.920
2005	7.123.647	5.331.383	219.338	2.472.872	8.483
2006	8.740.725	5.499.199	417.190	3.386.847	9.010
2007	11.429.270	7.264.259	662.389	3.882.884	9.460
2008	11.099.349	11.623.277	544.081	6.222.393	10.725
2009	10.382.014	9.035.210	685.597	2.286.769	9.350
2010	13.805.531	12.373.049	1.534.946	3.611.176	8.996
2011	17.423.590	16.777.568	1.639.041	6.224.936	9.034
2012	15.155.277	17.741.207	647.859	6.736.042	9.585
2013	15.053.591	18.218.459	507.615	6.827.644	12.095
Total	121.891.787	112.497.971	7.211.236	45.039.859	

Sumber : Disperindag Jatim dan BI

Berdasarkan Tabel 1.5. nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun pada periode tahun 2003 – 2013. Kurs adalah jumlah satuan atau unit dari mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh atau membeli satu unit atau satuan jenis mata uang lainnya. Kurs khususnya kurs rupiah per Dollar sangat berkaitan erat dan mempengaruhi arus barang dan jasa serta modal dari dalam dan keluar Indonesia.

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Boediono (2002:23), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala di atas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pengertian belanja pembangunan menurut Revrisond Baswir (2000:44) adalah : “Belanja pembangunan adalah belanja pemerintahan yang bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan”. Pengertian Belanja Daerah yang di dalamnya termasuk belanja modal/pembangunan menurut Peraturan Pemerintahan No. 58 tahun 2005 adalah : “Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Adapun belanja modal/pembangunan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Belanja daerah pembangunan Jawa Timur semakin meningkat dari tahun ke tahun melebihi peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri, dimana menurut Rostow dan Musgrave Jawa Timur dikategorikan pada tahap awal pembangunan ekonomi, karena belanja pemerintah masih berperan besar dalam menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Berdasarkan Data Belanja Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Jawa Timur ditunjukkan oleh Tabel 1.6. terlihat bahwa belanja pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode tahun 2003 – 2013.

Tabel 1.6 :

**Data Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2003 – 2013**

Tahun	Penerimaan		Pengeluaran	
	Pendapatan (juta Rupiah)	Pembiayaan (juta Rupiah)	Belanja (juta Rupiah)	Pembiayaan (juta Rupiah)
2003	3.307.723	576.721	2.969.621	914.823
2004	3.879.930	617.433	3.516.027	981.336
2005	4.266.723	862.128	4.045.400	1.083.451
2006	5.103.268	1.245.199	5.126.545	1.221.922
2007	5.940.048	915.170	5.267.845	1.587.373
2008	7.075.106	1.723.922	6.203.661	2.595.367
2009	7.827.695	2.061.247	7.602.039	2.286.903
2010	9.980.545	1.995.753	10.206.317	1.769.981
2011	11.493.376	1.564.783	11.685.921	1.372.238
2012	15.543.040	1.359.475	15.311.543	1.590.972
2013	15.286.013	1.467.924	16.215.604	538.333

Sumber : BPS Jatim

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur Tahun 2003-2013 dengan metode Regresi Linier Berganda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB, ekspor, belanja daerah pembangunan, inflasi, suku bunga kredit dan kurs secara simultan mempengaruhi PMDN di Jawa Timur?
2. Apakah PDRB, ekspor, belanja daerah pembangunan, inflasi, suku bunga kredit, dan kurs secara parsial mempengaruhi PMDN di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh PDRB, ekspor, belanja daerah pembangunan, inflasi, suku bunga kredit dan kurs secara simultan terhadap PMDN di Jawa Timur
2. Menguji dan menganalisis pengaruh PDRB, ekspor, belanja daerah pembangunan, inflasi, suku bunga kredit dan kurs secara parsial terhadap PMDN di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu ekonomi makro
2. Sebagai bahan rekomendasi terhadap pembuat kebijakan ekonomi khususnya dalam membuat keputusan terkait Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan penanaman modal dalam negeri

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara berurutan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Dari uraian-uraian tersebut diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi beberapa landasan teori yang dipakai untuk membahas topik penelitian ini, antara lain Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB, Suku Bunga Kredit, Infasi, Belanja Daerah, Ekspor dan Kurs

BAB 3 : KERANGKA PIKIR

Bab ini berisi kerangka konseptual pemikiran yang mendasari pokok bahasan masalah dan diungkapkan hipotesis penelitian dalam penulisan tesis ini.

BAB 4 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai hasil analisa data-data yang telah dilakukan dalam penelitian, pembahasan mengenai analisa menggunakan Ordinary Least Square (OLS) disertai dengan perhitungan pembuktiannya. Dalam bab ini juga akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam tesis ini berdasarkan hasil perhitungan dan landasan teori yang relevan.

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN